

BAB V

Penutup

5.1. Kesimpulan

Klaim Filipina dan Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan telah menimbulkan sengketa antara kedua negara. Penelitian ini menggambarkan dan menjabarkan mengenai proses pembuatan kebijakan luar negeri Filipina yang bersifat kooperatif pada masa pemerintahan Duterte terhadap agresivitas Tiongkok terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan. Berdasarkan proses pembuatan kebijakan luar negeri dengan konsep *rational choice model*, penulis menemukan bahwa para aktor pembuat kebijakan yang terdiri atas Duterte sebagai Presiden dan Senat sebagai lembaga legislatif memiliki motivasi kepentingan ekonomi dan keamanan yang ingin dipertahankan. Kepentingan ekonomi antara lain adalah posisi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar, investasi \$1 miliar dolar di bidang energi dan bantuan proyek infrastruktur sebesar \$ 11,7 juta. Sementara itu kepentingan keamanan Filipina adalah penandatanganan MOU kerja sama pemberantasan narkoba (War on Drugs) dimana Tiongkok memberikan hibah sebesar ₱ 714,57 triliun serta bantuan pemberantasan terorisme di Filipina. Berdasarkan kepentingan tersebut, para pembuat kebijakan telah melakukan proses kalkulasi keuntungan dan kerugian pengambilan kebijakan yang terdiri dari dua pilihan yaitu kebijakan kooperatif dan konfrontatif.

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa kebijakan kooperatif merupakan pilihan kebijakan yang menimbulkan keuntungan yang lebih besar bagi Filipina. Para pembuat kebijakan telah

mengkalkulasikan kepentingan ekonomi dan keamanan yang besar terhadap Tiongkok sehingga akan menimbulkan kerugian yang besar jika mengambil kebijakan yang konfrontatif. Sehingga pada tahap *choice* atau pemelihan kebijakan, Filipina di masa pemerintahan Duterte mengambil kebijakan yang bersifat kooperatif. Kebijakan tersebut antara lain meliputi mendekati diri dengan Tiongkok, pembentukan mekanisme konsultasi bilateral terkait penyelesaian sengketa dan *joint ventures* terkait *oil explorations* di kawasan Reed Bank.

5.2. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Peneliti menyarankan perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai penyebab dikeluarkannya kebijakan Filipina yang bersifat kooperatif terhadap Tiongkok di masa Duterte. Penelitian lanjutan tersebut dapat menggunakan kerangka analisis individu yang dapat menganalisis kebijakan Filipina dari perspektif individu Duterte sebagai pemimpin. Dengan adanya penelitian lanjutan dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang tidak menjadi fokus dari penelitian ini.